

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM
PEMBELAJARAN IPS (ILMU PENGATAHUAN SOSIAL) DI SMA
NEGERI 6 TAKALAR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada
Jurusan Pendidikan sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH

ASBAR

10538274313

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Asbar**, NIM **10538274313** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor **097** Tahun **1440 H/2019 M**, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh **Gelar Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Sabtu, **29 Juni 2019**.

23 Syawwal 1440 H

Makassar, -----

28 Juni 2019 M

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Basri, M.Pd.

Penguji
1. Drs. H. Nurdin, M.Pd.

2. R. Nursat, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Abdul Aziz Muslimin, M.Pd.

4. Kesmanuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di
SMA Negeri 6 Takalar

Nama : Asbar

NIM : 10538274313

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk
dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Syawwal 1440 H

Makassar,

28 Juni 2019 M

Usahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Sukri Syamsudin, M.Hum.

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asbar

NIM : 10538274313

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

**Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMA
Negeri 6 Takalar**

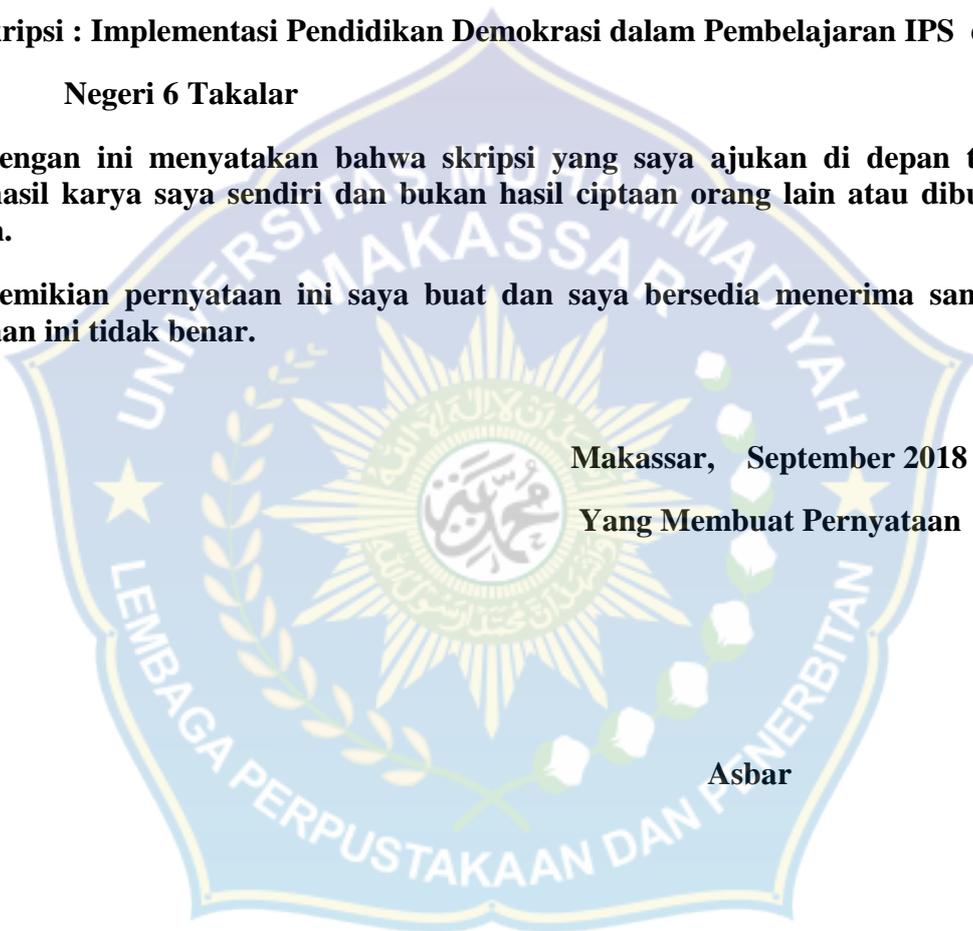
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2018

Yang Membuat Pernyataan

Asbar



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Asbar

NIM : 10538274313

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, September 2018
Yang Membuat Perjanjian

Asbar

Motto

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Bobby Unser)

Persembahkan

Karya kecilku ini ku persembahkan sebagai wujud kasih sayang dan terima kasihku

kepada:

Ayahandaku BASRI dan Ibundaku LAWIYA atas keringat, doa, semangat, motivasi, air mata dan inspirasi yang tcurahkan untukku

Ku bingkiskan karya kecilku

kepada:

Saudaraku yang tersayang sebagai sumber semangatku, sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan serta almamater yang aku banggakan, Universitas Muhammadiyah
Makassar

ABSTRAK

Asbar. 2018. *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Andi Sukri Syamsuri, dan Pembimbing II Kaharuddin .

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar (2) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar dan (3) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Takalar. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X IPS 1 SMA Negeri 6 Takalar. Sampel penelitian ini yaitu kelas X IPS1. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada Mata Pelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar sudah terimplementasikan dengan baik dengan nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan yaitu toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan yang dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, Dan penugasan, (2) Faktor-Faktor Pendukung Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Sarana dan Prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, dan (3) Faktor-Faktor Penghambat Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.

Kata kunci: *Pendidikan Demokrasi, Mata Pelajaran IPS*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar"*, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati, Sosok pemimpin yang terpercaya, jujur, dan berakhlak karimah yang telah bersusah payah mengeluarkan manusia dari kungkungan kebidaban, sehingga sampai saat ini manusia mampu memposisikan diri sebagai warga negara yang senantiasa beriman dan bertaqwa di jalan Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa mulai dari penyusunan, hingga selesai skripsi ini ditulis, tidak sedikit hambatan dan tantangan yang dialami penulis. Namun, hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, tidak berlebihan kalau sekiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Erwin Akib, M.Pd., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Drs,H.Nuridin., M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi, Bapak Dr.H.Andi Sukri Syamsuri, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak kahrudin., M.Pd,Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.Bapak

Ilham S.Pd.,M.Pd, selaku Kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar yang dengan baik hati telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 6 Takalar, Ibu Aisyah S.sos selaku guru IPS, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, Segenap guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 6 Takalar atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, Siswa siswi SMA Negeri 6 Takalar yang ikut berpartisipasi dan telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, Teristimewa Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahandaku Basri dan Ibundaku Lawiyah atas segala doa dan dukungan tak terhingga yang selalu tercurah untuk keberhasilan ananda, Kakanda Syahban Nur yang selalu memberikan motivasi dan support kepada saya selama ini. Serta semua pihak yang telah ikut serta memberikan bantuannya, yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal ibadah dan bantuan yang diberikan dengan tulus ikhlas serta limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa tercurah kepada kita. Amin .

Makassar, 1 September 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	7
A. Pendidikan Demokrasi	7
1. Demokrasi Dalam Pandangan Pendidikan	7

2. Ruang Demokrasi Pada Lembaga Pendidikan	10
3. Sekolah Sebagai Medang Penumbuhan Nilai Nilai Demokrasi	13
B. Teori Demokrasi	17
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Informan	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN	42
A. Profil Sekolah	42
B. Visi, Misi Dan Tujuan SMA Negeri 6 Takalar	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
B. Pembahasan	76
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	83
C. Simpulan	83
D. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Tabel populasi	68
3.2. Tabel Sampel	69



DAFTAR GAMBAR

Bagan	Halaman
2.1. Bagan Kerangka Pikir	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diketahui sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, menyadari betapa pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini secara terencana, sistematis dan berkesinambungan dalam pembangunan dan pembentukan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pendidikan demokrasi juga ikut andil membentuk karakter bangsa agar bersikap jujur, adil dan transparan.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratein. Demos berarti rakyat sedangkan kratein berarti kekuasaan. Bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia sudah di gariskan dalam berbagai peraturan perundangan. Seperti dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa “Pendidikan dan pengajaran harus membimbing siswa-siswi menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab”.

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat (Udin S. Winataputra, 2012).

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Zamroni (2011) mengatakan bahwa pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis tanpa

manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.

Pancasila sebagai landasan ideologi negara terafiliasi dengan pelaksanaan kehidupan demokrasi sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Darmodiharjo dalam Sunarso dkk (2008: 80), bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara demokrasi mengupayakan perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kultur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Carter dan Herz dalam Miriam Budiarto (1980: 86-87), menyatakan bahwa kultur kehidupan demokratis terlihat dari adanya pemerintahan yang mampu menjamin hak-hak individu secara konstitusional, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, serta kebebasan untuk berserikat.

Indonesia sebagai negara yang demokratis memiliki beberapa permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya pada pelaksanaan Pemilu. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti politik uang, kebocoran hak suara, kampanye hitam, penggelapan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap), hingga panitia penyelenggara Pemilu yang kurang profesional.

Dunia pendidikan juga memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Beberapa permasalahan diantaranya fenomena guru otoriter, diskriminasi sosial, perkelahian antar pelajar, dan bullying di antara para siswa. Beberapa guru masih mempraktikkan cara mengajar yang otoriter. Paul Suparno menyatakan bahwa masih banyak guru tidak dapat menerima gagasan siswa yang berlainan dengan yang mereka ajarkan, siswa

banyak dikekang kebebasan berpikirnya dan bahkan dimatikan kreativitasnya (Tonny D. Widiastono, 2004: 128).

Interaksi yang berjalan di antara guru dan siswa di sekolah juga masih kurang demokratis. Hal ini terbukti dengan adanya diskriminasi dan kasus bullying. Kebanyakan kasus diskriminasi dilatarbelakangi oleh adanya stratifikasi sosial ekonomi di masyarakat (Pupuh Faturahman dkk, 2013: 23). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus bullying juga masih tetap terjadi di sekolah.

Pendidikan memegang peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita demokrasi bagi generasi muda kita. Sekolah dalam hal ini sebagai penyelenggara pendidikan harus mampu menyelenggarakan pendidikan demokrasi. Sikap dan mental demokrasi harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan (Amas Mahmud, 2011: 12). Nilai-nilai maupun prinsip demokrasi harus ditanamkan pada setiap generasi.

Oleh karena itu, Pendidikan demokrasi harus diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Salah satunya adalah mata pelajaran IPS. Pendidikan demokrasi sangat tepat jika diimplementasikan dalam pembelajaran IPS. Supardi (2011: 182) mengungkapkan bahwa materi IPS terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan kebangsaan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntunan dunia global.

Kegiatan observasi awal yang dilakukan sebelum penelitian dimulai menunjukkan bahwa di SMA Negeri 6 Takalar pendidikan demokrasi masih belum diimplementasikan secara maksimal. Banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya nilai-nilai demokrasi, terutama bagi para siswa yang berada pada jenjang awal terutama kelas-kelas non

unggulan. Siswa juga belum terbiasa menjalankan nilai-nilai demokrasi yang telah ditetapkan dan masih terbawa oleh kebiasaan atau perilaku mereka pada jenjang sekolah sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar”**. Penelitian difokuskan kepada nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan, proses pembelajaran, dan faktor serta hambatan yang ada dalam implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan demokrasi sekolah diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar ?
2. Nilai-nilai demokrasi apakah yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar ?
3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendidikan demokrasi sekolah diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar ?
2. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar ?

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mencapai beberapa manfaat. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang yang mengkaji tentang implementasi pendidikan demokrasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru

Penelitian ini di harapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada guru mengenai implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran IPS.

- b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi sekolah dalam menanamkan, membina, mensosialisasikan prinsip, ide dan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik.

- c. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa/siswi SMA Negeri 6 Takalar yaitu tau apa itu demokrasi dan terbiasa hidup berdemokrasi.

- d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bekal saat mengajar nanti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Pendidikan Demokrasi

1. Demokrasi Dalam Pandangan Pendidikan

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya paham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Prinsip utama demokrasi adalah :

- a. Kedaulatan di tangan rakyat,

- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari mereka yang diperintah,
- c. Kekuasaan mayoritas,
- d. Hak-hak minoritas,
- e. Jaminan hak-hak azasi manusia,
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur,
- g. Persamaan di depan hukum,
- h. Proses hukum yang wajar,
- i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional,
- j. Pluralisme dalam aspek sosial ekonomi dan politik,
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Bagaimana konsep demokrasi dalam perspektif pendidikan? Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut, baik secara fisik maupun mental spiritual. Demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik berbeda satu sama lain dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu pendidikan yang demokratis harus memberikan treatment berbeda kepada sasaran didik yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan

proses belajar-mengajar. Partisipasi orang tua dan masyarakat juga amat penting dalam merancang, mengembangkan dan melaksanakan proses pendidikan tersebut.

Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik, sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri, karena demokrasi adalah alami dan manusiawi. Ini berarti bahwa penelitian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengakui dan menghargai kemampuan dan karakteristik individu peserta didik. Tidak ada unsur paksaan atau mencetak siswa yang tidak sesuai dengan harkatnya.

Dengan demikian, demokrasi berarti perilaku saling menghargai, saling menghormati, toleransi terhadap pihak lain termasuk pengendalian diri dan tidak egois. Dalam proses pendidikan, semua pihak yang terkait menyadari akan alam atau atmosfer yang bernuansa saling menghargai tersebut, yaitu antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa dan antara guru dengan pihak-pihak anggota masyarakat termasuk orang tua dan lain-lain. Ini berarti bahwa dalam semangat demokrasi seorang harus tunduk kepada keputusan bersama atau kesepakatan bersama. Tidak terjadi keharusan penerimaan tanpa unsur paksaan, tetapi kesepakatan bersama yang akan menjadi sikap mereka semua. Dengan kata lain, seseorang menerima keputusan bersama dengan rasa ikhlas karena menomerduakan kepentingan pribadi dan tunduk kepada tuntutan kesejahteraan umum.

Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian *equal opportunity for all* artinya, anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan.

2. Ruang Demokrasi Pada Lembaga Pendidikan

Dalam kaitannya tentang demokrasi dan pendidikan. John Dewey memandang pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, lebih dari sebuah persiapan untuk hidup. Sebagai “*Way Of Life*” tidak dapat mungkin tercapai tanpa adanya pendidikan, sedangkan proses pendidikan itu sendiri haruslah merupakan proses yang demokratis, pendidikan yang menghargai segala perbedaan orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Salah satu anggota Tim ICCE (2005: 7), Zamroni menyatakan : “pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”.

Menurut Sunarso (2004: 3), Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak menaati aturan main yang telah sepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi.

Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan fraksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi.

Dalam mensosialisasikan nilai demokrasi perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stake holders* pendidikan demokrasi, dan seluruh masyarakat.

Sosialisasi Pendidikan demokrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :

“Menurut Setyo Raharjo (2002: 28), Pendidikan demokrasi adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik dilingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan demokrasi perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan asensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan demokrasi. Perhatian demokrasi harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran demokrasi harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat.”

Pendidikan demokrasi harus direncanakan secara matang oleh *stake holders* baik para pakar demokrasi sebagai *think-thank*, kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendidikan demokrasi ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistic dan universal. Keberhasilan pendidikan demokrasi dengan keluaran menghasilkan peserta didik memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang demokratis dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*).

Menurut Jimly Assiddiqie (2006: 1), Dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi pemimpin formal dan non formal bertanggungjawab untuk mewujudkan kehidupan demokrasi baik ranah organisasi negara (*state*), organisasi masyarakat (*civil state*), ranah institusi dunia usaha (*market institution*). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan demokrasi.

Dalam analisis Dewey, pendidikan demokratis menghendaki adanya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan prinsip andragogi. Konsep ini berusaha mengembangkan potensi peserta didik dengan cara diberi umpan dan kail, kemudian dibimbing mencari ikan sendiri, bukan langsung diberi ikan tanpa proses pemancingan. Dengan demikian, demokrasi pendidikan lebih menekankan pada nilai-nilai kebebasan.

Menurut Zamroni (2001: 31-32), Salah satu hakikat dari pendidikan demokrasi adalah pembelajaran peran dan partisipasi seluruh elemen sekolah untuk mengarahkan perjalanan pendidikan menuju cita-cita bersama. Bentuk pendidikan demokrasi tersebut akan tumbuh dan kokoh jika dikalangan peserta didik tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, keseimbangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan demokrasi merupakan upaya secara sadar dan terencana untuk mengembangkan, menanamkan, membina dan mensosialisasikan prinsip, ide dan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik agar peserta didik memahami dan terbiasa dalam kehidupan demokrasi.

3. Sekolah Sebagai Medang Penumbuhan Nilai-Nilai Demokrasi

Pendidikan dewasa ini harus bisa berfungsi ikut membangun kapasitas bangsa sebagai manusia pembelajar, sehingga bisa andal dan percaya diri dalam percaturan global sekarang serta rancangan ke masa depan. Dalam konteks ini, bukan hanya kukuh

dan lumintu dalam visi serta cita etis pendidikan yang humanis dan religius, melainkan juga pendidikan mempunyai daya dan tata kelola untuk memperkaya kehidupan yang demokratis.

Pengembangan nilai-nilai demokratis di dekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistence yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Langkah konkret yang menarik untuk direalisasi bersama, terutama oleh insan pendidik dan pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, adalah menciptakan ruang hidup dan praktek pendidikan sebagai sebuah kehidupan yang nyata.

Pokok-pokok dalam pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
- b. Adanya pemerintahan perwakilan.
- c. Bersumber pada persetujuan bebas mayoritas rakyat.
- d. Pelaksanaan hak-hak sosial dan politik.
- e. Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan diawasi.
- f. Penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
- g. Tegaknya hukum bersamaan dengan tegaknya keadilan.

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia baru yang lebih

demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa dan reformatif justru banyak politisi yang berkarakter oportunistik, arogan dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengembangkan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Padahal harus diakui, mereka memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi. Fenomena ini tentu sangat menarik untuk disimak, sebab ada kecenderungan asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat.

Diperlukan upaya agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada peserta didik dan melahirkan demokrat-demokrat yang ulung, cerdas, dan andal. Beratnya beban kurikulum yang harus dituntaskan telah membuat proses belajar mengajar menjadi kehilangan ruang berdiskusi, berdialog dan berdebat, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Akibatnya setelah lulus mereka menjadi asing di tengah-tengah rakyat. Tidak mungkin out-put dari dunia pendidikan mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang berdialog. Mustahil mereka bisa menghargai pendapat sebagai salah satu esensi demokrasi kalau iklim belajarnya berlangsung monoton. Sehingga dunia pendidikan perlu diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya demokrasi bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik moral dan spiritual. Apalagi di era millennium ketiga yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia, ranah demokrasi tentu akan menjadi penentu citra, kredibilitas, dan akseptibilitas bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia. Itu artinya, dunia pendidikan

dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistance yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi persoalan yang tentunya terkait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan, mengenai industri saat ini yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan.

Banyak pihak industri yang selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok humanis yang anti pencemaran dan pengrusakan lingkungan. sehingga pendidikan harus merancang perubahan-perubahan ke depan yang tetap ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi, dengan peningkatan solidaritas internasional, dan keseimbangan komitmen antara produktivitas, kemajuan sains dan teknologi, yang pada gilirannya dapat mengembangkan sektor perekonomian, namun tetap memperhatikan pemeliharaan lingkungan, dan misi kemanusiaan, sehingga mampu menetralsisir ketegangan-ketegangan sosial, dan mampu menjaga kelestarian alam yang tidak semata menjadi kebutuhan seluruh umat manusia dengan keseimbangan ekosistemnya, tapi juga akan diwariskan pada generasi mendatang.

B. Teori Demokrasi

1. Demokrasi Sebagai Suatu Nilai

Demokrasi sebagai suatu nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kenegaraan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan.

Nilai-nilai demokrasi antara lain sebagai berikut :

a. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini, perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi seringkali menimbulkan persoalan bagi warga negara maupun masyarakat pada umumnya.

Hak untuk menyampaikan pendapat ini wajib dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. Semakin cepat dan efektif cara pemerintahan memberikan tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan tersebut.

b. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga. Kebebasan berkelompok ini yang diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia

yang tak mungkin diingkari. Dalam era modern ini, kebutuhan berkelompok ini tumbuh semakin kuat. Persoalan yang muncul ditengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar.

c. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi ini sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Jenis yang pertama adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden bentuk partisipasi kedua yang belum berkembang luas di negara demokrasi baru adalah apa yang disebut sebagai kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah.

d. Kerjasama

Kerjasama untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh masyarakat. Akan tetapi, kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok. Kerjasama diperlukan bagi kelompok-kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain.

Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan antar kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi.

e. Kestaraan Antar-Warga

Kesetaraan atau egalitarisme merupakan salah salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kestaraan disini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kestaraan

memberikan tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi etnis.

Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi atas kelompok etnis, bahasa, daerah atau agama.

f. Kedaulatan Rakyat

Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga negara sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan.

Dalam Orde Baru, para politisi boleh dikatakan tidak *accountability*. Mereka berbuat sesuka hati dalam bentuk menikmati semua fasilitas dan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Accountability tergolong ke dalam kelompok nilai-nilai demokrasi yang sulit dikembangkan. Dalam era ORBA, praktis para politisi bisa dikatakan tidak *accountable*. Mereka berbuat sesuka hati dalam bentuk menikmati semua fasilitas dan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Kondisi rezim ini sangat bertolak belakang dengan kondisi rezim demokrasi. Dalam demokrasi, justru harus *accountability*, yakni melayani segala kebutuhan rakyat.

g. Rasa Percaya (*Trust*)

Rasa percaya antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh.

Rasa percaya antar Kelompok masyarakat merupakan minyak pelumas untuk melancarkan relasi-relasi sosial politik yang ada dalam masyarakat yang sering terhalang oleh rasa ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan yang berpotensi memendekkan proses demokrasi.

h. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan umum, karenanya semuanya memiliki kodrat yang sama. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.

Dalam proses politik, perkembangan ke arah kesetaraan gender dalam politik di era pasca-reformasi 1998. Namun, hal itu hanyalah sebagian kecil solusi dalam persoalan kesetaraan gender. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan gender, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain.

2. Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS

a. Demokrasi di IPS

Proses belajar mengajar dengan segala interaksi di dalamnya disebut pembelajaran. Dalam pasal UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Menurut Hamalik Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Proses tindakan belajar pada dasarnya adalah bersifat internal, namun proses itu dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal. Misalnya, perhatian peserta didik dalam pembelajaran dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar.

Menurut Briggs (1992) Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan.

Menurut Agus Supriyono (2009: 13) pembelajaran merupakan terjemahan dari learning, pembelajaran berdasarkan makna lesikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari.

Menurut Degeng (dalam Hamzah, 2010: 4), pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran memiliki hakikat perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses dan cara menjadikan peserta didik untuk belajar. Pembelajaran di sekolah merupakan upaya menyampaikan pengetahuan kepada siswa dan menyiapkan menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan memegang peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita demokrasi bagi generasi muda kita. Sekolah dalam hal ini sebagai penyelenggara pendidikan harus mampu menyelenggarakan pendidikan demokrasi. Sikap dan mental demokrasi harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan (Amas Mahmud, 2011: 12). Nilai-nilai maupun prinsip demokrasi harus ditanamkan pada setiap generasi.

Supardi (2011: 182) mengungkapkan bahwa materi IPS terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan kebangsaan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntunan dunia global.

b. Pengertian IPS & Demokrasi

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan penyederhanaan dari berbagai ilmu-ilmu sosial dengan tujuan utama adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari National Council for Social Studies NCSS dalam Savage dan Armstrong (1996: 9), mendefinisikan social studies sebagai berikut :

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political sciences, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences.

Dari definisi di atas, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat diartikan sebagai kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan untuk mengembangkan potensi kewarganegaraan. Di dalam program persekolahan Ilmu Pengetahuan Sosial dikoordinasikan sebagai bahan sistematis dan dibangun di atas beberapa disiplin ilmu antara lain Antropologi,

Ilmu Politik, Arkeologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Hukum, Filsafat Psikologi, Agama, Sosiologi, dan juga mencakup materi yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu-ilmu alam.

Numan Somantri (2001: 44) menyatakan bahwa Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah itu sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara, dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Ilmu pengetahuan sosial merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, lingkungannya berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan dua perspektif mengenai pengertian IPS di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kajian ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk pembelajaran di sekolah dan mempunyai tujuan agar peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai (values) sehingga dapat menjadi warga negara yang baik berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang.

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "*power of the people*", yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya paham demokrasi, sampai-

sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi berarti sebagai berikut :

- a. Bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi);
- b. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Dari akar kata di atas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu :

- 1) Lincoln (2003: 42-43), Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (*demos*: rakyat, dan *cratin* : memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah.
- 2) Tim Abdi Guru (2006: 130), Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat.

Menurut Harris Soche dalam buku yang berjudul "*paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*" (2017: 100). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut C.F Strong dalam buku yang berjudul "*paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*" (2017: 101). Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Dan pendapat yang paling populer pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*goverenment of the people, by the people and for the people*).

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem atau bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat artinya rakyat pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan.

c. Pembelajaran IPS

Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, berarti pembelajaran berarti sebuah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan model pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran.

Dalam pembelajaran pendidik harus benar-benar mampu menarik perhatian peserta didik untuk mencurahkan seluruh energinya sehingga dapat melakukan aktivitas belajar secara optimal dan memperoleh hasil belajar seperti apa yang diharapkan.

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Istilah pembelajaran lebih tepat digunakan karena ia menggambarkan upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar seseorang. Di samping itu, ungkapan pembelajaran memiliki makna yang lebih dalam untuk mengungkapkan tujuan pendekatan pembelajaran dalam upaya membelajarkan peserta didik.

Menurut Puskur (2001: 9) IPS adalah suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep ketrampilan-ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi.

Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh (1999: 1) menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya.

Menurut Resnik dalam Martorella (1991) Pembelajaran IPS adalah alih informasi pengetahuan dan keterampilan yang membantu peserta didik menempatkan diri dalam

situasi yang membuatnya mampu melakukan konstruksi-konstruksi pemikirannya dalam situasi wajar, alami, dan mampu mengekspresikan dirinya secara tepat apa yang mereka rasakan dan mampu melaksanakannya.

Martoella (1987) mengatakan bahwa pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada “transfer konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya.

Dari beberapa uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pembelajaran IPS adalah suatu sistem pendidikan yang terdiri dari berbagai faktor yang menyusun. Antara lain peserta didik, pendidik, media belajar, fasilitas belajar dan juga sumber belajar yang bertujuan membuat peserta didik menguasai dan memahami berbagai intregasi berbagai disiplin ilmu social. Seperti ekonomi, sejarah, sosial, geografi dan lain-lain. Selain ilmu sosial juga ilmu humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan.

3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berti Damayanti (2016) dengan judul **“Implemetasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang Cilacap”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang didukung oleh kultur dan kurikulum sekolah. Sekolah mengadakan beberapa strategi dalam menciptakan kultur demokratis diantaranya mengadakan kebiasaan, kegiatan khas, dan peraturan sekolah yang

berorientasi nilai-nilai demokrasi. Kurikulum yang disusun juga memuat tujuan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi yang berorientasi nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS diantaranya nilai kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, sikap saling mempercayai, menyelesaikan permasalahan secara damai, toleransi dan berpartisipasi.

Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Perencanaan pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi diawali dengan penyusunan tujuan, materi, metode, media dan evaluasi secara implisit,
- b. Pelaksanaan pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi dilaksanakan dengan memilih metode pembelajaran yang mendukung praktik-praktik nilai demokrasi, mengaitkan materi pembelajaran IPS dengan nilai demokrasi, dan memberikan pemahaman berupa contoh penerapan nilai demokrasi di masyarakat,
- c. Evaluasi pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi sikap. Evaluasi sikap dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap sikap siswa dan berpedoman pada lembar penilaian sikap.

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan pendidikan demokrasi yaitu :

- a. Faktor pendukung meliputi penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, interaksi yang berjalan antar guru dan siswa, guru selalu memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa. Serta kultur sekolah yang mendukung,

- b. Faktor penghambat diantaranya beberapa siswa kurang percaya diri, keseriusan siswa yang rendah, penggunaan media yang terbatas, serta masih adanya tindakan *bullying*.

Rini Yuliana (2013) dengan judul **“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan ips Di SMP Negeri 3 Gringsing Batang”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Gringsing Batang adalah nilai-nilai : Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Gringsing Batang telah dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapat mereka terkait dengan materi yang diberikan guru. Sejak dini guru mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Disamping itu guru juga memberikan teladan yang baik kepada siswa bagaimana mereka melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan ips di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, yaitu :

- a. Faktor pendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan IPS, yaitu :

- (1) Kurikulum, perubahan kurikulum dengan dimasukkannya pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran berdampak positif bagi pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Gringsing Batang,
 - (2) Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran,
 - (3) Budaya Sekolah, budaya yang dianut di SMP Negeri 3 Gringsing Batang menekankan pada budaya disiplin, dan
 - (4) Kepemimpinan, kepemimpinan Kepala SMP Negeri 3 Gringsing Batang dapat dijadikan panutan, mengingat sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan IPS, yaitu :
- (1) kurangnya dukungan orang tua, orang tua yang sibuk bekerja, menyebabkan anak kurang mendapatkan bimbingan hingga menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajarnya,
 - (2) Lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang negatif dapat memberi pengaruh buruk bagi pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi seorang siswa,
 - (3) Keterbatasan biaya, biaya masih menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pembelajaran, terkadang guru masih mengeluarkan biaya sendiri untuk menyusun media pembelajaran, dan

(4) Perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.

Nungki Dwi Abshita Rini (2017) dengan judul **“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan IPS”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran Pendidikan ips di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul adalah nilai toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, saling menghormati, dan percaya diri. Implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan ips dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya terkait materi yang disampaikan oleh guru. Guru mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari.

Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan ips di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul yaitu :

- a. Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, gambar, dan buku pelajaran yang digunakan sebagai referensi;
- b. Budaya sekolah, budaya yang dianut di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul menekankan pada kedisiplinan;
- c. Kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah dijadikan panutan karena sekolah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan ips di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul yaitu :

- a. Kurangnya dukungan orang tua, orang tua yang sibuk menyebabkan anak kurang mendapatkan bimbingan sehingga anak kesulitan dalam belajarnya;
- b. Lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang negatif dapat memberikan pengaruh buruk untuk pembentukan sikap dan perilaku anak;
- c. Perbedaan individu, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

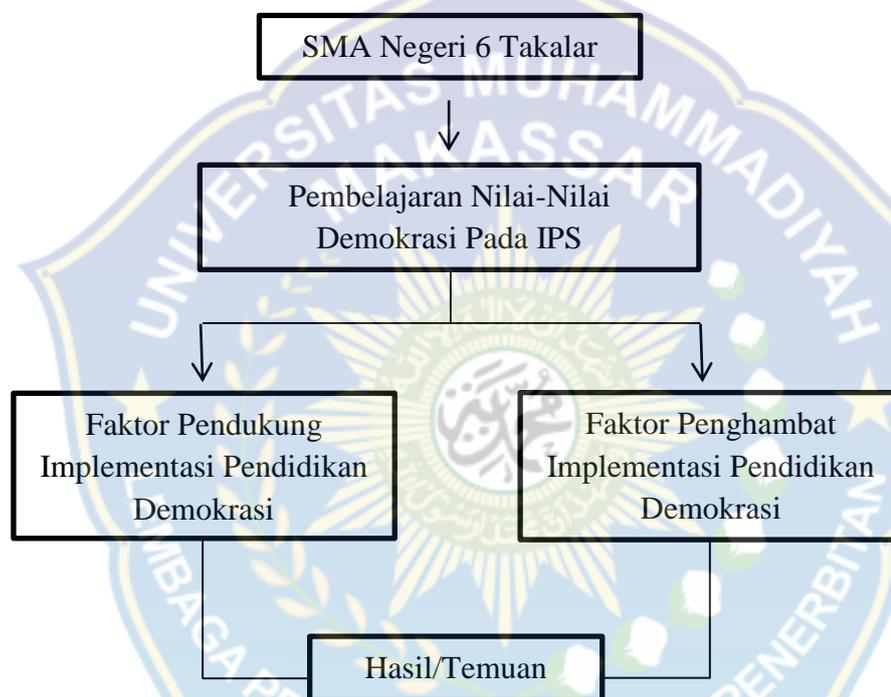
Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan ips di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul yaitu :

- a. Kesadaran orang tua, orang tua harus lebih memiliki kesadaran untuk memberikan perhatiannya kepada siswa didalam dan diluar sekolah;
- b. Keterlibatan masyarakat, masyarakat harus dapat menciptakan suasana nyaman dan ikut berperan dalam mengawasi siswa diluar sekolah; dan
- c. Komunikasi yang baik, komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS. Untuk lebih jelasnya, berikut skema bagan kerangka fikir :

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Objek alamiah menurut Sugiyono (2013: 15) adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

B. Informan

Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sugiyono (2013: 300) menjelaskan *Purposive Sampling* adalah pengambilan data dipilih dengan pertimbangan tertentu, informan dianggap mengetahui mengenai tema penelitian. Informan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah (1) kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar. (2) guru IPS SMA Negeri 6 Takalar, dan (3) siswa SMA Negeri 6 Takalar.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di fokuskan pada implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS(ilmu pengetahuan sosial) di SMA Negeri 6 Takalar.

D. Sumber Data

Menurut Sutopo (2006: 56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Informasi dari kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar. (2) Informasi dari guru IPS SMA Negeri 6 Takalar, dan (3) Informasi dari beberapa siswa SMA Negeri 6 Takalar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari sekolah yaitu nama-nama siswa dan jumlah siswa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipergunakan dalam menggali data. Dalam penelitian ini data digali dengan instrumen, yaitu : Peneliti terjun kelapangan secara langsung, mengumpulkan data, menganalisis dan membuat kesimpulan dengan alat bantu yang dipakai yaitu : (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, dan (3) dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 224), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan untuk mengetahui : (1) Implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS, (2) Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS dan (3) faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan demokrasi.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung fenomena-fenomena terhadap proses pembelajaran di kelas X IPS 1 SMA Negeri 6 Takalar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengambil gambar terkait “Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar”.

Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diteliti dan ditelaah. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa silabus, RPP, suasana pembelajaran serta interaksi peserta didik dengan guru.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Suharsimi Arikunto 2010: 337-345) aktivitas analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. *Data reduction*

(reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah data direduksi untuk selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). *Conclusion drawing* (verifikasi) adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.



BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Sekolah

SMA Negeri 6 Takalar yang sebelumnya bernama SMAN 1 Polombangkeng Utara adalah salah satu sekolah negeri yang terletak di bagian utara Kabupaten Takalar. Berdiri pada tahun 2002. Saat ini memiliki bangunan yang memadai yang terdiri dari ; 23 kelas, masing-masing 8 lokal kelas X (4 kelas Program Matematika dan Ilmu Alam, 3 kelas Program Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 1 kelas Program Ilmu Bahasa dan Budaya), 8 lokal kelas XI (3 kelas Program MIPA, 4 kelas Program IPS dan 1 kelas Program IBB) dan 7 lokal kelas XII (4 kelas Program MIPA, 2 kelas Program IPS, dan 1 kelas Program IBB).

1. Identitas sekolah

- a. Nama Sekolah : SMA NEGERI 6 TAKALAR
- b. Berdiri tahun : 2002
- c. Alamat : Jl. Hj. Manila Dg Pati
- d. Telepon/ Fax. : (0418)323832
- e. Kabupaten/Kota : Takalar
- f. Kode Pos : 92252
- g. Propinsi : Sulawesi Selatan

2. Identitas Kepala Sekolah

- a. Nama Kepala Sekolah : ILHAM, S.Pd., M.Pd
- b. Umur : 48 Tahun
- c. Alamat : Sanrobone Takalar
- d. Telephone/HP : 081283103567

e. Pendidikan terakhir : PKLH (S2)

f. Lama menjabat : 7(tujuh) bulan

3. Profil Siswa

TAHUN PELAJARAN	JUMLAH SISWA			JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL
	KELAS X	KELAS XI	KELAS XII		
2013/2014	178	218	204	598	19
2014/2015	227	185	177	589	19
2015/2016	236	208	159	603	20
2016/2017	231	201	205	637	20
2017/2018	258	210	181	649	21
2018/2019	266	249	215	730	23

Data ini di peroleh dari kepala tata usaha SMA Negeri 6 Takalar

4. Profil Guru

NO	MATA PELAJARAN	JUMLAH		KET.
		GT	GTT	
1	Pendidikan Agama Islam	3	-	S1, S2
2	P K N	3	-	S1

3	Bahasa Indonesia	4	2	S1, S2
4	Bahasa Inggris	3		S1
5	Matematika Wajib	3	4	S1
6	Penjasorkes	1	3	S1
7	Seni Budaya	3	-	S1, S2
8	Sejarah Indonesia	-	3	S1
9	Prakarya dan Kewirausahaan	6	1	S1
10	Bahasa Makassar	-	2	S1
11	Matematika Peminatan	2	2	S1
12	Fisika	1	2	S1, S2
13	Biologi	3	-	S1
14	Kimia	3	-	S1
15	Sejarah	1	1	S1, S2
16	Geografi	-	3	S1
17	Sosiologi	2	-	S1, S2

18	Ekonomi	4	-	S1
19	Bahasa dan Sastra Indonesia	1	1	S1, S2
20	Bahasa dan Sastra Inggris	2	-	S1
21	Bahasa dan Sastra Jerman	2	-	S1
22	Bahasa dan Sastra Arab	1	-	S1
23	Antropologi	2	-	S1, S2

Data ini di peroleh dari kepala ruangan tata usaha SMA Negeri 6 Takalar

5. Personil Sekolah

a. Tenaga Pendidik

NO	N A M A	N I P	MATA PELAJARAN
1	Ilham, S.Pd., M.Pd	19700408 199512 1 003	Geografi
2	Drs. H. Sau, M.Si	19581231 198303 1 216	Pend. Agama Islam

3	Drs. H. Najamuddin	19591231 199111 1 001	Bahasa Inggris
4	Drs. Sahabuddin Nur	19640114 198903 1 014	Bahasa Asing
5	Drs. Nurfalah Makmur	19640407 199303 1 008	Matematika
6	Drs. Baharuddin, M.M	19690423 199403 1 009	Seni Budaya
7	Hj. Rukiah, S.Pd	19641231 198412 2 017	PKN
8	Bastari, S.Pd, M.Pd	19690419 199802 1 002	Bahasa Indonesia
9	Drs. Abd. Rauf	19641231 199802 1 008	Seni Budaya
10	Hawariah, S.Pd	19690909 199203 2 009	Bahasa Inggris
11	Muhammad Irfan, S.Ag, M.Pd.I	19711124 200312 1 006	Pend. Agama Islam
12	Muh. Afdal, SS, S.Pd, M.AP	19740825 200312 1 005	Sejarah

13	Hasriadi, S.Pd	19750503 200312 1 009	BK
14	Fitriani Parawansa, S.Pd	19760513 200502 2 006	Bahasa Inggris
15	Faisal Syarif, S.Sos, M.M	19721016 200502 1 001	Sosiologi
16	Hj. St. Nurhayani, S.Pd	19720923 200502 2 002	Kimia
17	Sitti Halfainah, S.Pd	19810703 200502 2 005	Biologi
18	Sahabuddin, S.Pd	19770725 200502 1 004	Ekonomi
19	Hj. Nurindah Nawing, S.Pd	19780902 200502 2 004	Biologi
20	Hasnawati, S.Pd, M.Pd	19771125 200502 2 002	Fisika
21	Syamsuri, S.Pd	19721211 200604 1 013	Penjaskes
22	Ramli Rasyid, S.Pd, M.Pd	19761128 200604 1 011	Bahasa Indonesia

23	Andi Nurjannah, S.Pd	19750112 200604 2 019	Ekonomi
24	Hj. Rahmawati Supu, S.Pd	19750420 200604 2 014	Kimia
25	Hj. Supartini, S.Pd	19720608 200604 2 023	Matematika
26	Hasriani, S.Pd	19740102 200604 2 020	PKN
27	Farida, S.Pd	19750617 200604 2 019	Ekonomi
28	Irma M, S.Pd	19741005 200604 2 023	PKN
29	Aisyah, S.Sos	19770824 200604 2 019	Sosiologi
30	Haeruddin, S.Pd	19720730 200604 1 011	Matematika
31	Abd. Majid, S.Pd	19710611 200701 1 019	Ekonomi
32	Nurlinda, S.Pd	19760402 200701 2 015	Bahasa Indonesia
33	Syahria S, S.Pd	19750303 200701 2 028	Bahasa Indonesia

34	Irma Suryani, S.Pd	19741227 200903 2 003	Muatan Lokal
35	Ahmad Amin, S.Ag	19750124 201001 1 009	Bahasa Asing
36	Sunniati, S.Pd	19830725 201001 2 035	Bahasa Asing
37	Darmawati, S.Pd	19790828 201101 2 010	Biologi
38	Hasnawati, S.Pd	19791023 201101 2 011	Kimia
39	Artiwan Bangsawan, S.Pd	19860326 200902 1 002	BK
40	Abd. Rahman, S.Ag	19740903 201408 1 001	Pend. Agama Islam
41	Hernawati, S.Pd, M.Pd		Matematika
42	Srikundi, S.Pd		Fisika
43	Syahriwati, S.Pd, M.Pd		Fisika
44	Hattajur, S.Pd.I		Prakarya dan KW

45	Iswadi Lahadi, S.Pd		Sastera Indonesia
46	Aswar, S.Pd		Penjaskes
47	Aswati, S.Pd		Matematika
48	Nur Susilawati, S.Pd		Matematika
49	Lenni Wahyuni Arif, S.Pd		Matematika
50	Lidya Husain, S.Pd		Geografi
51	Musdalifah, S.Pd		Sejarah
52	Kasrina, S.Pd		Bahasa Indonesia
53	Wahidah Iskandar, S.Pd		Sejarah
54	Sunarti, S.Pd		Sejarah
55	Zulpianah Ekayanti, S.Pd		Penjaskes

56	Lisnawati, S.Pd		Bahasa Makassar
57	Rivai Abriansyah, S.Pd		Geografi
58	Novianti Usman, S.Pd		Bahasa Indonesia
59	Ruswanti Surahman, S.Pd		Matematika
60	Andi Rahmatyadi Aska, S.Pd		Penjasorkes
61	Agustina, S.Pd		Bahasa Makassar
62	Kasmawati, S.Pd		Geografi

b. Tenaga Administrasi

NO	N A M A	N I P	IJAZAH
1	Kamsinah, S.E	19651231 199203 2	S1

		069	
2	Ani Baharuddin, S.E	19830526 201406 2 003	S1
3	Sukmawati Kadir, S.E	19820823 201411 2 002	S1
4	Hadijah, SE		S1
5	Jumriani, SE	-	S1
6	Rohani Irwan, S.E		S1
7	Abd. Rajab, S.Kom		S1
8	Irnawati, S.Hum		S1

c. Tenaga Pendukung

NO	N A M A	BIDANG TUGAS	IJAZAH
1	Lili Tula	Keamanan	SMP

2	Arif Tompo	Tukang Kunci dan Kebersihan	SMP
4	Hasbi Sabaruddin	Kebersihan	SMA

6. Tugas Tambahan

Sebagian besar tenaga pendidik diberi tugas tambahan untuk kelancaran kegiatan pembelajaran secara struktural dan pembinaan siswa

a. Kepala Sekolah : Ilham, S.Pd., M.Pd

b. Wakil Kepala Sekolah :

1) Bidang Kurikulum : Sahabuddin, S.Pd

2) Bidang Sarana : Bastari, S.Pd, M.Pd

3) Bidang Kesiswaan : Drs. Baharuddin, M.M

dan Humas

c. Wali Kelas

1) Kelas X MIPA 1 : Irma Suryani, S.Pd

2) Kelas X MIPA 2 : Darmawati, S.Pd

3) Kelas X MIPA 3 : Faridah, S.Pd

4) Kelas X MIPA 4 : Fitriani Parawansa, S.Pd

5) Kelas X IPS 1 : Irma M., S.Pd

6) Kelas X IPS 2 : Aisyah, S.Sos

7) Kelas X IPS 3 : Abd. Majid, S.Pd

- 
- 8) Kelas X IBB : Sunniati, S.Pd
- 9) Kelas XI MIPA 1 : Hasriani, S.Pd
- 10) Kelas XI MIPA 2 : Andi Nurjannah, S.Pd
- 11) Kelas XI MIPA 3 : Hj. Rahmawati Supu, S.Pd
- 12) Kelas XI IPS 1 : Drs. Abd. Rauf
- 13) Kelas XI IPS 2 : Ahmad Amin, S.Ag
- 14) Kelas XI IPS 3 : Syahriah S., S.Pd
- 15) Kelas XI IPS 4 : Faizal, S.Sos., M.M.
- 16) Kelas XI IBB : Hawariah, S.Pd
- 17) Kelas XII IPA 1 : Hj. St. Nurhayani, S.Pd
- 18) Kelas XII IPA 2 : Hj. Supartini, S.Pd
- 19) Kelas XII IPA 3 : Sitti Halfainah, S.Pd
- 20) Kelas XII IPA 4 : Nurlinda, S.Pd
- 21) Kelas XII IPS 1 : Abdul Rahman, S.Ag
- 22) Kelas XII IPS 2 : Hj. Rukiah, S.Pd
- 23) Kelas XII IBB : Drs. Sahabuddin Nur
- d. Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium :
- 1) Kepala Perpustakaan : Ramli Rasyid, S.Pd., M.Pd
- 2) Kepala Laboratorium : Hj. Nurindah Nawing, S.Pd
- e. Koordinator-koordinator :
- 1) PKB/PKG : Drs. Nurfalah Makmur
- 2) BP/BK : Hasriadi, S.Pd
- f. Staf Wakil Kepala Sekolah

- 1) Staf Kurikulum : Irma M., S.Pd
 - 2) Staf Kurikulum : Hasnawati, S.Pd., M.Pd
 - 3) Staf Sarana : Muhammad Irfan, S.Ag., M.Pd.I
 - 4) Staf Sarana : Faizal, S.Sos., M.M.
 - 5) Staf Kesiswaan : Syamsuri, S.Pd
 - 6) Staf Kesiswaan : Hawariah, S.Pd
- g. Laboran :
- 1) Fisika : Hasnawati, S.Pd., M.Pd
 - 2) Kimia : Hj. St. Nurhayani, S.Pd
 - 3) Biologi : Darmawati, S.Pd
 - 4) Komputer : Abd. Rajab, S.Kom
- h. Pembina Organisasi Intra dan Ekstrakurikuler
- 1) OSIS : Syamsuri, S.Pd.
 - 2) Pramuka Putra : Muh. Afdal, S.S, S.Pd. M.AP
 - 3) Pramuka Putri : Sitti Halfainah, S.Pd
 - 4) KIR : Ahmad Amin, S.Ag
 - 5) PMR dan UKS : Musdalifah, S.Pd
 - 6) Koperasi Siswa : Abd. Majid, S.Pd
 - 7) Rohani Islam : Muh. Irfan, S.Ag. M.Pd.I
 - 8) Sanggar Seni : Irma Suryani, S.Pd
 - 9) Jurnalistik : Nurlindah, S.Pd
 - 10) Paskibra : Faizal, S.Sos, M.M.
 - 11) Kelompok Drum Band : Hattajur, S.Pd.I

- 12) Pencak Silat : Aisyah, S.sos
- 13) Siswa Pencinta Alam : Abdul Rahman, S.Ag
- 14) Tim O2SN : Aswar A., S.Pd
- 15) Deutch Adventure Club : Drs. Sahabuddin Nur
- 16) FIK-R : Hasriadi, S.Pd
- 17) Tim OSN Matematika : Drs. Nurfalalah Makmur
- 18) Tim OSN Fisika : Hasnawati, S.Pd., M.Pd
- 19) Tim OSN Kimia : Hj. St. Nurhayani, S.Pd
- 20) Tim OSN Biologi : Darmawati, S.Pd
- 21) Tim OSN TIK : Abd. Rajab, S.Kom
- 22) Tim OSN Ekonomi : Andi Nurjannah, S.Pd
- 23) Tim OSN Geografi : Kasmawati, S.Pd
- 24) Tim OSN Kebumihan : Rivai Abriansyah, S.Pd
- 25) Tim OSN Astronomi : Srikundi, S.Pd

7. Sarana dan Prasarana

N0	RUANG	JUMLAH	LUAS (m ²)	KETERANGAN
1	Kepala Sekolah	1	28	Permanen
2	Wakasek	1	12	Permanen
3	Dewan Guru	1	48	Permanen
4	Guru BK	1	12	Permanen

5	Tata Usaha	1	40	Permanen
6	Ruang Belajar	19	1.008	Permanen
7	Laboratorium IPA	3	162	Permanen
8	Laboratorium Komputer	1	48	Permanen
9	Perpustakaan	1	60	Permanen
10	O S I S	1	12	Permanen
11	Tempat Ibadah (Mushallah)	1	40	Permanen
12	Pos Jaga	1	2,25	Permanen
13	Lapangan Serba Guna	1	200	Permanen
14	Gudang	1	18	Permanen

8. Prestasi yang dicapai tiga tahun terakhir

NO	KOMPETISI / KEJUARAAN	PERINGKAT	TAHUN
----	-----------------------	-----------	-------

1	Barisan Indah antar Pelajar Se-Kec Polut	I	2012
2	Barisan Indah antar Pelajar Se-Kab Takalar	II	2012
3	Paskibra Tingkat Pelajar SMA Kab-Takalar	I	2012
4	Traveling Kepalaung Merahan Kemah Bakti dan Lomba Ke-7	I	2013
5	Barisan Indah antar Pelajar Se-Kec Polut	I	2013
6	Barisan Indah antar Pelajar Se-Kab Takalar	II	2013
7	Gerak Jalan Indah Pramuka Se-Kab Takalar	II	2013
8	Lingkungan Hidup di PPLH Puntondo	I	2013
9	Cerdas Cermat Tk. Wira Se-Sul-Sel	III	2013
10	Traveling Ke Palang Merahan Se-Sul-Sel	I	2014
11	Atletik Lompat Jauh SMA Se-Kab. Takalar	I	2014
12	Tata Upacara SMA Se-Kab. Takalar	III	2014

13	Debat Bahasa Inggris UIN Alauddin	III	2014
----	--------------------------------------	-----	------

9. Anggaran Sekolah (sesuai APBS)

TAHUN	SUMBER DANA (Rp)			Jumlah (Rp)
	B O S	GRATIS	LAIN-	
2014	72.000.000	281.220.000	-	353.220.000
2015	351.000.000	281.220.000	-	632.220.000
2016	754.280.000	281.220.000	-	1.035.500.000
2017	866.600.000	-	-	866.600.000

Data di peroleh dari kepala ruangan tata usaha SMA Negeri 6 Takalar.

10. Potensi Lingkungan Sekolah yang Mendukung Program Sekolah

- a. Jumlah Guru mata pelajaran yang memadai dan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.
- b. Memiliki Laboratorium : Lab. Kimia, Biologi, Fisika, Komputer yang memadai walaupun masih perlu peningkatan dalam kuantitas dan kualitas alat.
- c. Memiliki perpustakaan yang cukup memadai.
- d. Lokasi yang jauh dari suara bising kendaraan sehingga memiliki suasana yang tenang untuk belajar dan mudah dijangkau.
- e. Merupakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri binaan Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional RI tahun 2008

- f. Memiliki lahan kosong yang memungkinkan untuk penambahan dan perluasan bangunan baru dan penataan taman sekolah menuju terwujudnya wawasan 11 K yang dapat menunjang terlaksananya program peningkatan kualitas pembelajaran yang terpadu dan komprehensif.

B. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 6 Takalar

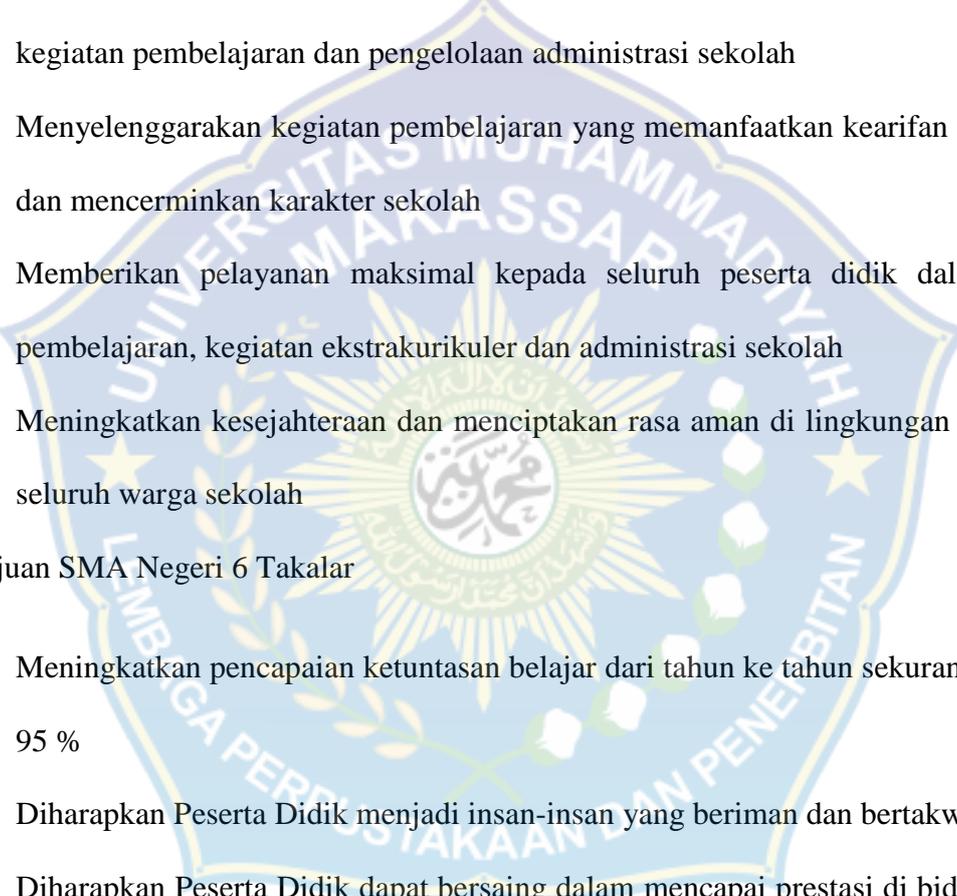
1. Visi SMA Negeri 6 Takalar

'Terwujudnya Lulusan Yang Memiliki Iman Dan Takwa Yang Kuat, Menguasai Ilmu Pengatahuan Dan Teknologi Serta Mampu Mengimplementasikan Nilai-Nilai Moral, Etika Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-hari'.

Indikator :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang mengedepankan budaya mutu
- b. Mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan peserta didik supaya mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan
- c. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan maksimal bagi bakat dan minat peserta didik
- d. Tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Menanamkan budaya cinta kebersihan dan keindahan lingkungan kepada seluruh warga sekolah
- f. Terimplementasinya budaya religi dan nilai-nilai etika dan moral dalam pergaulan di lingkungan sekolah

2. Misi SMA Negeri 6 Takalar

- 
- a. Mengimplementasikan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan agar tercipta lulusan yang memiliki daya saing
 - b. Mengimplementasikan pembelajaran berbasis karakter bangsa agar tercipta lulusan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur.
 - c. Menumbuhkembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan administrasi sekolah
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan kearifan budaya lokal dan mencerminkan karakter sekolah
 - e. Memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan administrasi sekolah
 - f. Meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah bagi seluruh warga sekolah
3. Tujuan SMA Negeri 6 Takalar
- a. Meningkatkan pencapaian ketuntasan belajar dari tahun ke tahun sekurang-kurangnya 95 %
 - b. Diharapkan Peserta Didik menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa
 - c. Diharapkan Peserta Didik dapat bersaing dalam mencapai prestasi di bidang olahraga dan kesenian.

Strategi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

- a. Peningkatan Prestasi Akademik
- b. Peningkatan kualitas dan ketrampilan guru
- c. Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar

- d. Mengembangkan sistem evaluasi hasil belajar
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana
 - f. Pengembangan kurikulum dan sistem pengujian
 - g. Peningkatan partisipasi warga sekolah
 - h. Penataan guru (on the job training) dan pelatihan
 - i. Peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan
 - j. Penegakan tata tertib sekolah
 - k. Peningkatan disiplin siswa, guru, dan karyawan
 - l. Pengendalian kegiatan siswa, guru, dan karyawan
 - m. Peningkatan kerjasama antara sekolah dengan institusi pasangan (Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha)
 - n. Mengadakan lomba dan karya ilmiah
- Peningkatan Insan-insan yang Beriman dan Bertakwa
- a. Penyusunan Program Ibadah Bersama
 - b. Melaksanakan bakti kampus dan bakti social
 - c. Mengadakan lomba pidato dan baca Al-Qur'an
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana ibadah
 - e. Mengadakan peringatan hari besar agama
 - f. Mengadakan pengajian 1 kali setiap 15 hari
 - g. Mengadakan bimbingan kepada siswa yang but abaca Al-Qur'an
- Peningkatan Prestasi Non Akademik
- a. Pengadaan sarana ruang pameran

- b. Pengadaan sarana ruang olahraga (gedung olahraga)
- c. Pengadaan lapangan olahraga
- d. Pengadaan inventaris pakaian olahraga dan alat-alat olahraga
- e. Pengadaan bahan dan alat kesenian
- f. Pengadaan majalah dinding
- g. Pemeliharaan sarana olahraga dan kesenian
- h. Mengadakan latihan yang kontinu untuk cabang olahraga dan kesenian
- i. Penataan lingkungan sekolah

C Analisis Peluang dan Tantangan

1. Potensi dan Kelemahan Internal

a. Potensi Internal (Strength)

- 1) Memiliki tenaga pendidik yang berijazah S1 dan S2
- 2) Sebagian tenaga pendidik sedang mengikuti pendidikan S2
- 3) Hampir semua mata pelajaran diajarkan oleh guru sesuai bidangnya
- 4) Memiliki sarana pembelajaran yang cukup memadai
- 5) Adanya Lab Komputer yang dapat mengakses internet
- 6) Kebijakan sekolah bagi guru mata pelajaran mengikuti forum MGMP Kabupaten untuk pengembangan profesi guru
- 7) Memiliki lahan yang luas untuk pengembangan sekolah
- 8) Lokasi sekolah yang cukup tenang karena jauh dari bising kendaraan namun masih mudah dijangkau

9) Merupakan SMA yang pertama berstatus negeri di wilayah Polongbangkeng Utara

b. Kelemahan Internal (Weakness)

- 1) Kurangnya kepekaan dan ketrampilan guru dalam pemanfaatan sarana prasarana sekolah sebagai sumber belajar
- 2) Minat guru terhadap penguasaan dan penggunaan ICT masih kurang
- 3) Buku referensi di perpustakaan masih kurang
- 4) Kurangnya alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan praktikum IPA
- 5) Belum ada tenaga Laboran
- 6) Keterbatasan tenaga fasilitator dalam pengembangan bahan ajar berbasis ICT
- 7) Belum memiliki Local Area Network (LAN) dan berbasis web / internet yang dapat diakses oleh warga sekolah

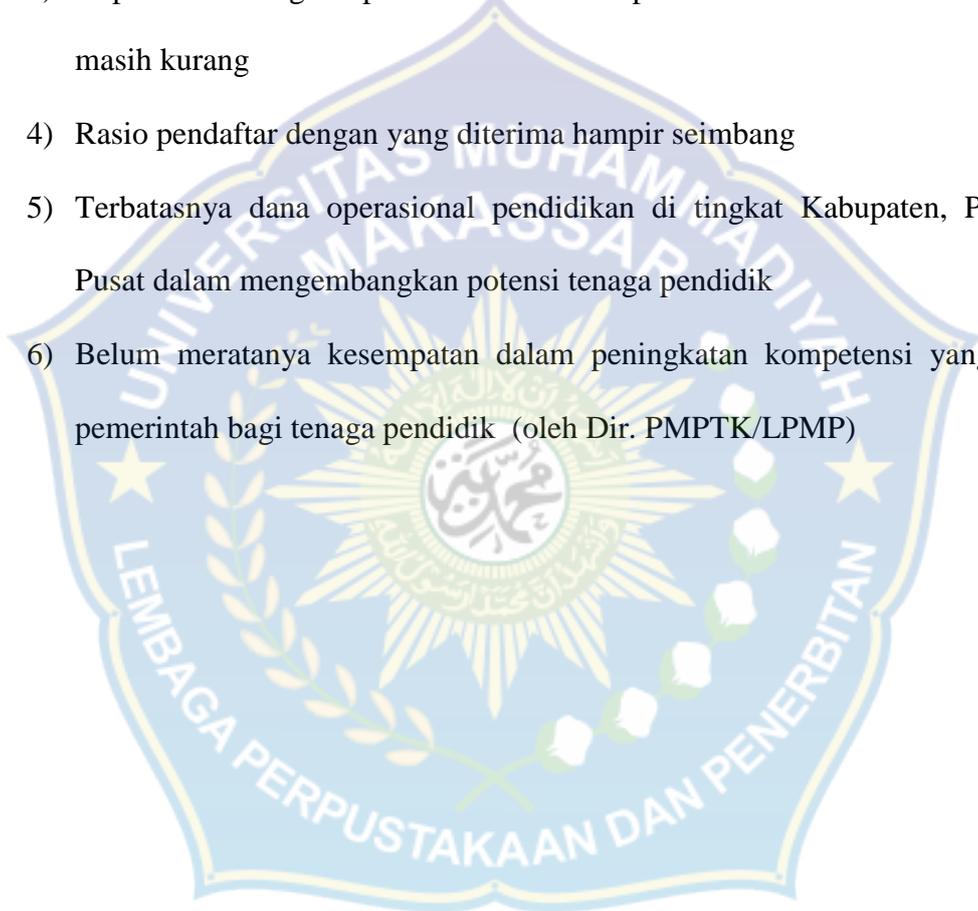
2. Potensi dan Tantangan Eksternal

a. Potensi Eksternal (Peluang/ Opportunity)

- 1) Adanya Peran Aktif Komite sekolah dalam menunjang program sekolah
- 2) Adanya Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri dari Direktorat Pembinaan SMA Depdiknas
- 3) Tersedianya sekolah pendukung yang jumlahnya cukup memadai
- 4) Tersedianya Beasiswa untuk peserta didik yang berprestasi dan ekonominya tidak mampu
- 5) Perhatian yang tinggi dari Pengawas SMA Kabupaten dalam membimbing tenaga pendidik

b. Kelemahan Eksternal (Ancaman/ Threat)

- 1) Akses keberbagai lembaga dan sumber informasi sebagian besar melalui teknologi informasi
- 2) Rata-rata kemampuan orang tua peserta didik masih rendah
- 3) Kepedulian orang tua peserta didik terhadap sekolah dan keberhasilan pendidikan masih kurang
- 4) Rasio pendaftar dengan yang diterima hampir seimbang
- 5) Terbatasnya dana operasional pendidikan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat dalam mengembangkan potensi tenaga pendidik
- 6) Belum meratanya kesempatan dalam peningkatan kompetensi yang dilakukan pemerintah bagi tenaga pendidik (oleh Dir. PMPTK/LPMP)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin informan	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	8	25%
2	Perempuan	24	75%

Dari tabel diatas menunjukkan 32 responden dengan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden dengan presentase 25% (laki-laki 8 orang) dan presentase 75% (perempuan 24 orang).

2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur informan	Frekuensi	Presentase
1.	14 Tahun	6	18,75%
2.	15 Tahun	24	75%
3.	16 Tahun	2	6,25%

Dari tabel diatas menunjukkan 32 responden dengan distribusi frekuensi berdasarkan umur responden dengan presentase 18,75% (umur 14 tahun), presentase 75% (umur 15 tahun), dan presentase 6,25% (umur 16 tahun).

3. Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6

Takalar

a. Nilai-Nilai Demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar

Pembelajaran pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas secara sistematis dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa .

Menurut sunarso (2004: 3), pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Pembelajaran pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu menjadi wahana pembentukan karakter siswa sehingga siswa memiliki pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, partisipasi dan bertanggung jawab. Untuk itu, pembelajaran IPS memiliki peran dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa.

Menurut wawancara dengan Bapak Ilham S.Pd.,M.Pd (Wawancara, 06 Oktober 2018) selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar menyatakan bahwa:

“Sebagai pendidik saya memiliki visi dan misi untuk dapat membentuk pribadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia sehingga dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar selalu mendorong guru selain mencerdaskan siswa juga membentuk kepribadian yang baik dari para siswanya. Pengimplementasian nilai-nilai demokrasi yang diharapkan kepala sekolah kepada guru IPS selain melalui kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif

dalam hal ini materi pembelajaran maupun strategi atau metode pembelajaran yang digunakan juga melalui keteladanan yang baik dari perilaku guru itu sendiri.

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan IPS di kelas tentu tidak lepas dari peran guru. Menciptakan suasana yang hangat di sekolah sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar semaksimal mungkin.

Menurut wawancara dengan siswa bernama Nur Aulia Inayah kelas X IPS 1 (Wawancara, 8 Oktober 2018) menyatakan bahwa:

“Guru IPS dalam mengajar menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, guru biasanya menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kemudian melakukan tanya jawab”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru IPS dalam mengajar sering menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pelaksanaan metode pembelajaran tersebut merupakan salah satu wujud dari implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran.

Kemudian wawancara dengan siswa bernama Mardiana Siregar kelas X IPS 1 (Wawancara, 11 Oktober 2018) menyatakan bahwa:

“Dalam mengajar guru IPS telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi karena beliau tidak membedakan antara siswa yang pandai dengan yang bodoh”.

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa pembelajaran yang dilaksanakan guru telah berusaha melatih siswa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi pada proses belajar mengajar. Guru IPS tidak selamanya hanya menjelaskan dalam memberikan materi tetapi juga memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpendapat

ataupun bertanya. Dalam pelaksanaan diskusi kelas dan presentasi telah mengandung nilai-nilai kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berkelompok.

b. Pengimplementasian Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar

1. Data Observasi dan Dokumentasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips di SMA Negeri 6 Takalar

Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian *equal opportunity for all* artinya, anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Hal ini tidak lepas dari peran seorang guru IPS. Guru IPS adalah sebagai salah satu informan yang bertugas penuh dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa. Dalam hal ini, guru menggunakan strategi pendekatan kepada siswa untuk menumbuhkan nilai demokrasi. Menurut Setyo (2002: 28), pendidikan demokratis adalah suatu proses, pendekatan yang di gunakan secara komphensif, pendidikan in hendaknya di lakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Nilai demokrasi yang dimaksud adalah nilai toleransi, kebebasan berpendapat, kerjasama dan saling menghormati.

»

- a. Data observasi yang disampaikan informan berikut berikut bernama Ichlasul Haq Andi Makkawa kelas X IPS 1 (Observasi, 11 Oktober 2018) menyatakan bahwa:

“Guru IPS dalam mengajar sudah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, karena guru dalam mengajar bersifat terbuka dan selalu membuka kesempatan yang luas kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami”.

Berdasarkan data tersebut diatas hasil observasi dilapangan bahwa pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar diterapkan dalam pembelajaran IPS dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa diantaranya, toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang lain, kepercayaan diri, dan kesadaran akan perbedaan.

Hal ini juga di ungkapkan dari hasil observasi di lapangan yang di lakukan oleh peneliti kepada guru IPS di SMA NEGERI 6 TAKALAR.

(observasi guru IPS 13 oktober 2018) menyatakan bahwa :

“Dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMA NEGERI 6 TAKALAR ialah selain mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa, juga menggunakan media pembelajaran dalam kelas , seperti laptop, dan beberapa buku referensi”.

Dari hasil observasi, bahwa selain mengamalkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa SMA Negeri 6 Takalar, juga di fasilitasi langsung sarana dan prasarana yang baik.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai guru dapat lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dalam kelas berjalan lebih efektif dan efisien.

b. Dokumentasi

“ Dalam mengajar guru ips telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi karena beliau tidak membeda-membedakan antara siswa yang pandai dengan bodoh.”

(Mardiana siregar, Dok, 11 oktober 2018)

Dari pernyataan di atas tampak bahwa pembelajaran yang dilaksanakan guru telah berusaha melatih siswa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi pada proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan kepada siswa di SMA Negeri 6 Takalar berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari sikap siswa dalam menerima pelajaran dari guru, selain melalui kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dalam hal ini materi pembelajaran maupun strategi atau metode pembelajaran yang digunakan juga melalui keteladanan yang baik dari perilaku guru itu sendiri.

Dalam proses pembelajaran pendidikan IPS di kelas tentu tidak lepas dari peran guru dalam menciptakan suasana yang hangat di kelas sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar semaksimal mungkin.

“Pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran ips salah satunya yaitu perbedaan individual dimana setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.”

(guru ips, dok, 11 oktober 2018)

Dari hasil dokumentasi di atas adalah selama proses pembelajaran guru selalu menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang biasa, selagi dapat di utarakan dengan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Namun dalam aspek lain yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan IPS adalah kebebasan berkelompok dan kepercayaan diri. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya, namun terkadang guru sendiri yang membagi siswa ke dalam kelompok diskusi.

Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental siswa sesuai nilai-nilai demokrasi, juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di kelas.

c. Faktor-Faktor Penghambat Pada Implementasi Pendidikan

Demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar

Dalam mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran Pendidikan ips sebagai wahana penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar ini tentunya memiliki beberapa kendala yang dialami oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan ips Diantaranya kendala Perbedaan individual.

Masing-masing siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya perbedaan ini menuntut adanya perbedaan perlakuan antara siswa yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini seorang guru harus mampu membuat strategi pembelajaran terutama dalam hal pemilihan metode yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam belajar.

Menurut wawancara dengan Ibu Aisyah S.sos (Wawancara, 13 Oktober 2018) selaku guru IPS menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan IPS salah satunya yaitu perbedaan individual dimana setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi, namun ada juga sebagian siswa yang memang agak lambat, ada siswa yang mau di atur dan ada pula yang susah diatur”.

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa perbedaan individual siswa sangat berpengaruh pada proses pembelajaran dan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun dengan demikian, guru hendaknya dapat menyiasati kondisi ini dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Faktor-Faktor Pendukung Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar

Tak hanya faktor penghambat dalam mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran Pendidikan IPS sebagai wahana penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar tentunya ada yang menjadi pendukung dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa diantaranya sarana dan prasarana.

Menurut wawancara dengan Bapak Ilham S.Pd.,M.Pd (Wawancara, 16 Oktober 2018) selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar menyatakan bahwa:

“Keberhasilan sebuah pendidikan atau pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Untuk itu saya selalu memfasilitasi guru dengan sarana dan prasarana yang memadai agar mempermudah proses pembelajaran”.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara Ibu Aisyah S.sos(Wawancara, 16 Oktober 2018) selaku guru Pendidikan IPS menyatakan bahwa:

“Dalam proses pembelajaran saya selalu menggunakan media pembelajaran seperti LCD, laptop, dan beberapa buku referensi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai guru dapat lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.

B Pembahasan.

1. Pengimplementasian Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Di SMA Negeri 6 Takalar

Pendidikan merupakan sarana dan alat yang dapat digunakan untuk mengalihkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pendidikan diharapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Menurut Karl marx kehidupan individu dan masyarakat kita di dasarkan pada asas ekonomi, antara lain berarti institusi politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, keluarga, dan sebagainya bergantung pada tersedianya sumber sumber ekonomi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat di simpulkan bahwa teori sosiologi Karl marx sangat cocok di terapkan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan.

Menurut Zambroni (2001: 31-32), salah satu hakikat dari pendidikan demokrasi adalah pembelajaran peran dan partisipasi seluruh elemen sekolah untuk mengarahkan

perjalanan pendidikan menuju cita-cita bersama. Oleh sebab itu pendidikan diharapkan mengarah pada pandangan dan praktek yang membangun ruang pembelajaran dan dapat memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keberadaban.

Dari berbagai wawancara dan observasi yang di peroleh informan bahwa implementasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 6 Takalar terdiri atas 2 poin yaitu:

a. Nilai-nilai demokrasi yang di tanamkan pada siswa SMA Negeri 6 Takalar

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar diantaranya yaitu Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, menghormati oranglain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan.

Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi dan kesadaran akan perbedaan merupakan aspek yang terkandung dalam demokrasi. Selama proses pembelajaran, guru berusaha menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang biasa tetapi perbedaan pendapat itu harus diutarakan dengan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Aspek lain yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan IPS adalah kerjasama, kebebasan berkelompok dan kepercayaan diri. Metode pembelajaran yang dipilih guru diupayakan agar siswa mampu bekerjasama secara baik dengan rekan-rekannya secara berkelompok. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya, namun terkadang guru sendiri yang membagi siswa ke dalam kelompok diskusi.

b. Pengembangan nilai-nilai demokrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi

manusia yang beriman serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan ini bahwa Pendidikan demokrasi dapat dijadikan tempat bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan dan potensi pada diri siswa sehingga siswa dapat menjadi manusia yang berkarakter.. Hal tersebut dapat memposisikan pembelajaran Pendidikan demokrasi sebagai pembentukan karakter.

Pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki kepribadian yang kuat di tengah-tengah konflik peradaban.

Adapun untuk pengembangan pendidikan demokrasi secara penerapan tingkah laku membentuk pola belajar yang demokratis terdapat Dalam *Teori nya Max Weber* tentang Perilaku Sosial.

Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Perilaku memengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Di teori perilaku sosial ini yang merangkum output apa yang nanti dihasilkan dari implementasi pendidikan demokrasi dalam sekolah.

Kepercayaan orang akan alam yang teratur, hasrat yang lemah untuk meningkatkan status, dan tingkat kemauan yang tinggal pada individu.

1. Kontrol Sosial (Social Control)

Control sosial ialah pengawasan/pengendalian oleh masyarakat terhadap tingkah laku individu berupa control psikologis dan nonfisik, ini merupakan tekanan mental terhadap

individu sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai penilaian masyarakat (kelompok), karena ia berada dalam masyarakat (kelompok) tersebut.

Hasil yang akan dicapai dengan adanya control sosial yaitu:

- a. Terjaminnya kelangsungan kehidupan kelompok (masyarakat).
- b. Terjadinya integritas (keterpaduan) didalam masyarakat
- c. Terjadinya proses pembentukan kepribadian sesuai keinginan kelompok masyarakat tersebut.

Control sosial (biasanya) tidak sama dengan control politik (political control). Hanya di Negara-Negara totaliter saja sebenarnya, control sosial sama persis, bahkan berimpitan dengan control politik.

Sebagai contoh control politik adalah adanya aksi unjuk rasa sebagian anggota masyarakat, semula merupakan control sosial yang bercorak informal, bergeser menjadi control politik yang bercorak formal, yang akhirnya akan bergeser menjadi “judicial control” (pengawasan oleh lembaga hukum) sebagai instansi control yang tertinggi dalam masyarakat.

Cara-cara melakukan control sosial adalah:

- a. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat (yang mereka miliki).
- b. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma sosial/kemasyarakatan.

Sekolah merupakan sebuah organisasi yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka

menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan ketrampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas dimasyarakat.

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Dalam analisis Dewey, pendidikan demokrasi menghendaki adanya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan prinsip andragogy. Konsep ini berusaha mengembangkan potensi peserta didik dengan cara di beri umpan dan ail, kemudian di bimbing mencari ikan sendiri, bukan langsung di beri ikan tanpa proses pemancingan.

Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan kelas, kenyamanan kelas, dan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran apapun. Interaksi guru dan siswa bukan sebagai subjek-objek, melainkan subjek-subjek yang sama-sama membangun karakter dan jati diri.

2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Di SMA 6 Takalar

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran pendidikan IPS sebagai wahana penanaman nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 6 Takalar memiliki 2 faktor antaralain :

a. Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mendukung implementasi nilai-nilai demokrasi di sekolah diantaranya Sarana dan Prasarana. Guru lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru di SMA Negeri 6 Takalar dalam proses belajar mengajar seperti LCD, Laptop, beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran, karena guru tidak monoton dalam menyampaikan materi.

b. Faktor penghambat

Sedangkan faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi antara lain Perbedaan individual. Perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada siswa yang memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi, namun ada juga sebagian siswa yang memang agak lambat ada siswa yang mau di atur dan ada pula yang susah diatur. Namun dengan demikian, guru hendaknya dapat menyiasati kondisi ini dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada Mata Pelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan yaitu : Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar telah dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, Dan penugasan.

Faktor-Faktor Penghambat Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu : Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran.

Faktor-Faktor Pendukung Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu : Perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi guru dan sekolah

Guru IPS selama pembelajaran perlu mendorong siswa yang belum aktif untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok maupun diskusi kelompok agar menumbuhkan keberanian siswa untuk berani tampil didepan. Sedangkan untuk pihak sekolah disarankan untuk dapat mengembangkan lagi proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa.

2. Bagi siswa

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis atau di dalam khasanah bahasa Indonesia disebut masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Amas Mahmud. 2011. *Narasi Demokrasi*. Yogyakarta: Mata Padi Persindo.
- Berti Damayanti. 2016. *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Mata Pelajaran IPS Di SMP Diponegoro Majenang Cilacap*.
- Lincoln,A.2003.*Pengertian Demokrasi*. Di akses di (<http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurutpara-ahli.html>)
- Miriam Budiarjo. 1980. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Nungki Dwi Abshita Rini. 2017. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Pupuh Faturahman. 2013. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.
- Rini Yuliana. 2013. *Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Tim Abdi Guru. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VII*. Erlangga: Jakarta.
- Tonny D. Widiastono. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung: Citra Umbara, 2010

Winarno. 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publiishing.





**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1)
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA

Lembar Instrumen Wawancara Kepala Sekolah

Nama : ILHAM S.PD M.PD

Jabatan :KEPALA SEKOLAH

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1	Bagaimana menurut anda mengenai pendidikan demokrasi yang diterapkan dalam mata pelajaran IPS?	Sangat baik karena, selain mencerdaskan siswa juga membentuk kepribadian yang baik dari para siswa.
2	Apakah di sekolah ini diterapkan pendidikan demokrasi di mata pelajaran IPS ?	YA
3	Kegiatan demokrasi seperti apakah yang sering dilakukan di sekolah ini ?	Kebebasan berpendapat maupun kebebasan berkelompok.
4	Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut ?	YA
5	Pada kegiatan tersebut nilai-nilai demokrasi apakah yang ditanamkan pada siswa ?	diantaranya yaitu Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, menghormati oranglain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan.
6	Apakah ada kendala dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	ADA
7	Selain kendala tersebut apakah ada hal yang menjadi pendukung penanamana nilai-	Ya ada yaitu,saran dan prasaran

nilai demokrasi pada siswa ?

Lembar Instrumen Wawancara Guru IPS

Nama : AISYAH S.SOS

Jabatan : GURU IPS

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1	Apakah di sekolah ini pendidikan demokrasi terimplementasikan dengan baik ?	YA
2	Sebagai guru IPS bagaimana upaya yang anda lakukan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	Dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya.
3	Apakah terdapat kendala dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	Ya, salah satunya yaitu perbedaan individual dimana setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
4	Apakah anda menggunakan pendekatan khusus dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	YA
5	Metode pembelajaran apakah yang anda sering gunakan dalam pembelajaran IPS?	dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
6	Apakah ada media pembelajaran yang menjadi penunjang dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	YA

Lembar Instrumen Wawancara Siswa

Nama : NUR AULIA INAYAH

Jabatan : SISWA

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1	Dik, tau tidak apa itu demokrasi ?	TAU KAK
2	Bisa tidak kamu beri 1 contoh kegiatan demokrasi yang biasa dilakukan di sekolah ini ?	Kebebasan memilih kelompok kak
3	Apakah kamu dan seluruh siswa di sekolah ini dilibatkan dalam kegiatan tersebut ?	Iya kak
4	Bagaimanakah proses pembelajaran IPS dikelasmu apakah guru lebih sering menjelaskan didepan ?	Iya kak
5	Apakah kamu sering belajar secara berkelompok ?	Iya kak
6	Apakah yang menjadi kendala kalian dalam proses pembelajaran IPS ?	Perbedaan individual kak
7	Apakah guru memberi kebebasan kepada kalian membentuk kelompok sendiri dan berdiskusi sendiri menyelesaikan permasalahan yang diberikan?	Iya kak

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : SABTU 06 OKTOBER 2018
Waktu : 10:30
Tempat : RUANG KANTOR SEKOLAH

Identitas Informan

Nama Lengkap : ILHAM S.PD M.PD
Jenis Kelamin/Umur : LAKI-LAKI/48 TAHUN
Pendidikan Terakhir : PKLH (S2)
Mulai Kepsek Sejak : 2018
Jabatan : KEPALA SEKOLAH



TRANSKRIP WAWANCARA GURU IPS

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : SABTU 13 OKTOBER 2018
Waktu : 09:00
Tempat : RUANG GURU

Identitas Informan

Nama Lengkap : AISYAH S.sos
Jenis Kelamin/Umur : perempuan/39 tahun
Pendidikan Terakhir : SI
Mulai Mengajar Sejak : 2008
Jabatan : GURU



TRANSKRIP WAWANCARA SISWA

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : senin 08 oktober 2018

Waktu : 10:30

Tempat : kelas

Identitas Informan

Nama Lengkap : Nur Aulia Inayah

Kelas : X IPS 1



LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI



Foto wawancara kepala sekolah SMA NEGERI 6 TAKALAR



Wawancara guru IPS SMA NEGERI 6 TAKALAR



Wawancara salah satu siswa SMA NEGERI 6 TAKALAR



Wawancara guru dan siswa X IPS 1

LAMPIRAN 5

OBSERVASI

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti . Peneliti menemukan di lapangan bahwa pendidikan demokrasi di terapkan dalam pembelajaran IPS Di SMA Negeri 6 Takalar.

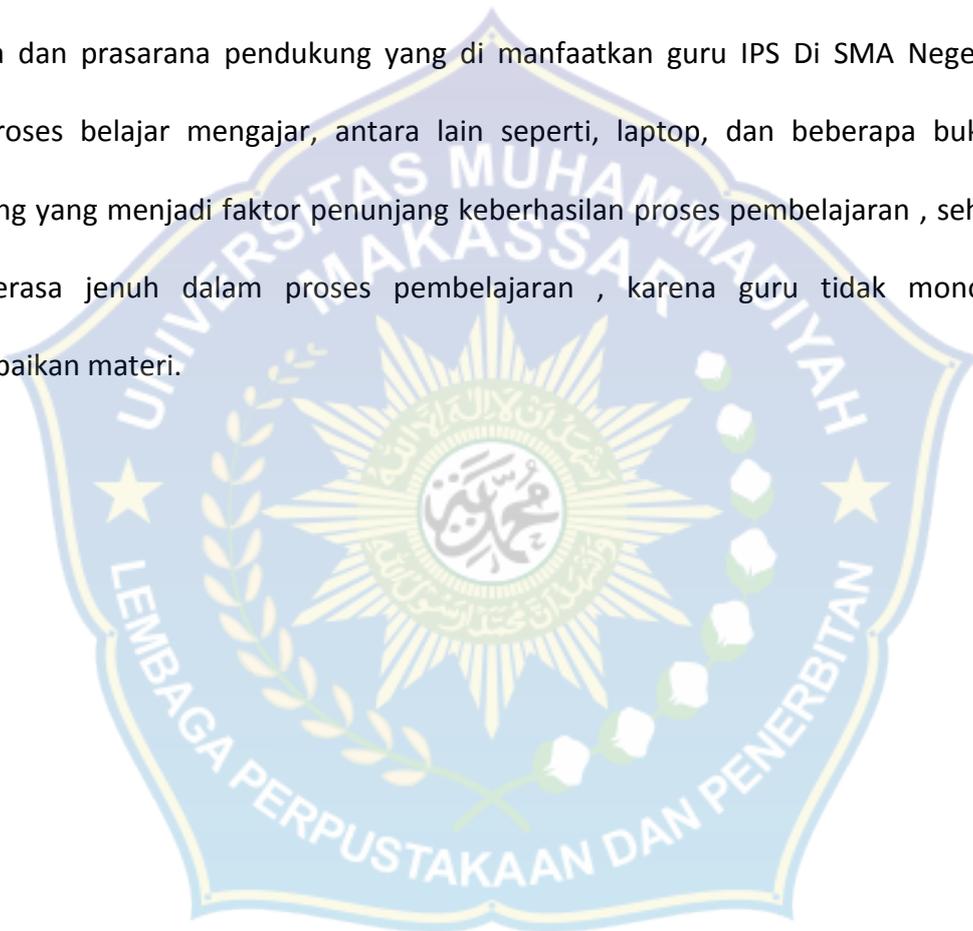
Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing siswa agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilaku siswa mencerminkan perilaku yang demokratis.

Pembelajaran pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS Di SMA Negeri 6 Takalar, merupakan proses belajar mengajar yang di lakukan di dalam kelas secara sistematis, dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Pembelajaran pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS mampu wahana pembentukan karakter siswa, sehingga siswa memiliki pribadi yang berahlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab.

Namun ada beberapa kendala atau penghambat dalam menerapkan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS Di SMA Negeri 6 Takalar, di antaranya perbedaan individual siswa, masing-masing siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik di lihat dari segi fisik maupun psikis. Dalam hal ini seorang guru harus mampu membuat strategi pembelajaran terutama dalam hal pemilihan metode yang di sesuaikan dengan kemampuan siswa dalam belajar.

Tentu ada yang menjadi pendukung dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa SMA Negeri 6 Takalar, di antaranya sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, guru lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana pendukung yang di manfaatkan guru IPS Di SMA Negeri 6 Takalar dalam proses belajar mengajar, antara lain seperti, laptop, dan beberapa buku referensi pendukung yang menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran , sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran , karena guru tidak monoton dalam menyampaikan materi.



DAFTAR PUSTAKA

- Amas Mahmud. 2011. *Narasi Demokrasi*. Yogyakarta: Mata Padi Persindo.
- Berti Damayanti. 2016. *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Mata Pelajaran IPS Di SMP Diponegoro Majenang Cilacap*.
- Lincoln, A. 2003. *Pengertian Demokrasi*. Di akses di (<http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurutpara-ahli.html>)
- Miriam Budiarto. 1980. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Nungki Dwi Abshita Rini. 2017. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Pupuh Faturahman. 2013. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.
- Rini Yuliana. 2013. *Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Tim Abdi Guru. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VII*. Erlangga: Jakarta.
- Tonny D. Widiastono. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung: Citra Umbara, 2010

Winarno. 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publiishing.

<https://ahmadwahyumaruto.blogspot.com/2015/03/pembelajaran-ips.html?m=1> (Online) diakses 26/06/18 pukul 11:28.

